

GERAKAN SOSIAL DAN MODEL AGENSI DALAM AKSI PEMBERANTASAN NARKOBA DI KOTA LHOKSEUMAWE

Oleh:

Fakhrurrazi, Nirzalin, Rizki Yunada

Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Aceh Utara

Email: fakhrurrazi@unimal.ac.id

ABSTRAK:

Artikel ini menunjukkan arti penting Gerakan Sosial dan model agensi dalam aksi Pemberantasan Narkobadi Kota Lhokseumawe). Isu ini strategis dan menarik diteliti karena Satu dekade terakhir, mafia narkoba telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat pasarnya. Realitasnya, penyebarannya meluas baik secara geografis maupun dari segi penggunanya. Satu dekade lalu, secara geografis penyebarannya berpusat di kota dan tempat-tempat hiburan malam, saat ini melebar hingga ke pelosok desa. Pengguna narkoba sepuluh tahun lalu terbatas pada kalangan tertentu, kini tidak lagi terbatas. Anak-anak, remaja dan bahkan terdapat pula disebagian daerah di Indonesia kaum agamawan pun menjadi pencandunya. Argumen utama tulisan ini menggunakan kerangka konsep agensi Giddens sebagai gerakan kolektif. Argumen tulisan akan diakhiri dengan uraian mengenai strategi Agensi gerakan yang bersifat suci karena didorong melalui justifikasi norma Islam melahirkan keberanian luar biasa masyarakat Ujoeng Pacu dalam menghadapi mafia narkoba. Artikel ini berangkat dari hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai *strategy of inquiry*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya yang diperkaya dengan studi literatur yang ekstensif.

Kata Kunci: *Gerakan Sosial, Model Agensi, Aksi, Pemberantasan Narkoba*

ABSTRACT:

This article shows the importance of the social movement and the agency model in the action to Eradicate Narcotics in Lhokseumawe City. This issue is strategic and interesting to study because in the last decade, the drug mafia has made Indonesia one of its market centers. In reality, it is spreading both geographically and in terms of its users. A decade ago, geographically its distribution was centered on cities and nightlife spots, now it extends to remote villages. Ten years ago, drug users were limited to certain circles, now they are no longer limited. Children, adolescents and even in some areas in Indonesia religious groups are also addicts. The main argument of this paper uses the conceptual framework of Giddens agency as a collective movement. The written argument will end with a description of the agency's strategy of a holy movement because it is pushed through the justification of Islamic norms to give birth to the extraordinary courage of the Ujoeng Pacu people in facing the drug mafia. This article departs

from the results of research using a qualitative approach with a case study as a strategy of inquiry. Data is collected through in-depth interviews, observations of selecting informants as data sources, assessing data quality, analyzing data, interpreting data and making conclusions on everything which is enriched with literature studies which is extensive.

Keywords: *Social Movements, Agency Model, Action, Drug Eradication*

PENDAHULUAN

Ada banyak keterlibatan pemerintah dalam penindakan dan meminimalisir peredaran narkoba. Lebih khusus lagi keterlibatan dalam penindakan secara preventif bagi gembong narkoba di seluruh Indonesia. Pencanangan hari anti narkoba tanggal 21 Maret 2016 oleh Presiden Joko Widodo menjadi titik penegas betapa narkoba bagi Indonesia tidak hanya menjadi ancaman tetapi telah menjadi media destruksi sosial luar biasa terhadap kehidupan bangsa.

Realitasnya, Indonesia telah bermetamorfosis dari negara sasaran antara narkoba berubah menjadi negara tujuan utama peredaran narkoba itu sendiri. Titik sebarannya pun mengalami evolusi dari daerah perkotaan dan tempat-tempat hiburan malam berkembang ke pelosok-pelosok desa. Maka, tidak salah ketika Presiden Joko Widodo menyebutkan, “Bahwa negara Indonesia betul-betul berada dalam situasi darurat narkoba. Butuh komitmen semua stakeholder dalam memerangi narkoba, bayangkan, setiap hari ada 30-50 orang penduduk Indonesia meninggal karena narkoba (Jurnal Indonesia, 26-03-2016).

Pelbagai pendekatan struktural yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberantas narkoba baik dengan menjatuhkan hukuman penjara puluhan tahun dan seumur hidup, bahkan hukuman mati pada para mafia narkoba yang tertangkap, namun, dalam tataran empiris pelbagai tindakan hukum tersebut tidak berhasil secara efektif mereduksi peredaran narkoba di Indonesia. Pada sisi

lain, perkembangan peredaran narkoba telah sangat mengancam eksistensi generasi bangsa Indonesia. Pada posisi inilah dibutuhkan strategi alternatif. Turun “gunung”nya para Teungku Dayah untuk terlibat aktif dalam pemberantasan narkoba di Aceh merupakan realitas baru yang menggembirakan. Hal ini, memperlihatkan bahwa narkoba tidak lagi merupakan urusan negara dan aparaturnya tetapi urusan bangsa Indonesia semuanya tanpa kecuali.

Dalam masyarakat Aceh figur elite agama lokal yang oleh masyarakat disebut dengan sebutan teungku dayah justru memiliki posisi sentral dalam meng-agensikan gerakan sosial dan pertahanan moral masyarakat Aceh. Berdasarkan temuan studi yang dilakukan oleh Nirzalin pada 2015, realitas itu diantaranya terpatir dalam kasus gerakan sosial dalam aksi pemberantasan narkoba. Perlawanan kolektif masyarakat terhadap mafia narkoba didorong oleh transformasi spirit keagamaan yang dilakukan oleh para teungku dayah kharismatik di wilayah ini. Para teungku dayahlah yang membentuk moral gerakan dari sekedar gerakan sosial menjadi gerakan jihad *fi sabilillah* melawan pengrusakan moral sosial (*kebathilan*). Hal ini tidak hanya berhasil membentuk soliditas gerakan tetapi sekaligus juga memperkuat pertahanan moralitas masyarakat dalam menghadapi serangan balik para mafia narkoba baik dalam bentuk teror maupun pelbagai aksi kekerasan (Nirzalin, 2015: 50).

Realitasnya, agensi sosial para teungku dayah berhasil membangkitkan keberanian masyarakat untuk melawan para mafia narkoba di U. Padahal para mafia ini terorganisir dan memiliki jaringan luas sehingga kuat dan mampu mengancam serta meneror masyarakat. Keberhasilan agensi sosial yang dilakukan para teungku dayah ini merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa kali gerakan perlawanan yang diagensikan oleh aparat *gampoeng* (desa) baik pada 2013 maupun 2014 gagal mengkonsolidasikan keberanian (*to encourage*) massa dan moralitas gerakan sehingga gerakan perlawananpun gagal. Baru pada tahun 2015, ketika teungku-teungku dayah kharismatik memelopori (agensi) gerakan perlawanan, gerakan ini berhasil.

Aksi massa menolak narkoba menarik untuk dikaji sebagai aksi gerakan sosial. Karena ini artikel ini bermaksud mendeskripsikan keterlibatan teungku dayah dan aparat desa sebagaigerakan sosial dalam aksi melawan mafia narkoba melalui konsolidasi massa dan berhasil merubah tatanan sosial masyarakat Desa Ujoeng Pacu Kota Lhokseumawe dari tatanan sosial yang terafiliasi dengan narkoba menjadi tatanan sosial baru yang lepas dari keterikatan sosial-ekonomi dengan narkoba. maka, fenomena ini signifikan untuk didalami sehingga dapat diperoleh pembelajaran berharga (*lesson learned*) bagi upaya sejenis baik khususnya di Indonesia.

PERSFEKTIF TEORITIC AND METHODS

Gerakan kolektif massa merupakan suatu gerakan sosial yang memiliki daya penetrasi dahsyat dalam menghasilkan suatu perubahan sosial yang substantif dan fundamental dalam perputaran dinamis sejarah sosial dan politik dunia. Demikian pentingnya gerakan kolektif massa ini, sebab catatan

historis sosial politik dunia menunjukkan hampir tidak ada perubahan-perubahan besar didunia tanpa diawali oleh aksi kolektif massa. Sebagai suatu gerakan sosial, gerakan kolektif massa sebagaimana disebutkan oleh Giddens (1993) merupakan suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective behavior*) diluar lingkup lembaga-lembaga yang mapan.

Sementara Tarrow (1998) berpandangan bahwa gerakan sosial sebagai politik perlawanan tatkala rakyat biasa –yang bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh- menggalang kekuatan untuk melawan para elite, pemegang otoritas dan pihak-pihak lawan lainnya. Ketika perlawanan ini didukung oleh jaringan social yang kuat dan digaungkan oleh resonansi kultural dan symbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah keinteraksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan dan hasilnya adalah gerakan sosial.

Menurut Tarrow, tindakan yang mendasari politik perlawanan adalah aksi kolektif yang melawan (*contentious collective action*). Tindakan kolektif bisa mengambil banyak bentuk, yang singkat maupun yang berkelanjutan, terlembagakan atau cepat bubar, membosankan atau dramatis. Umumnya tindakan kolektif berlangsung ketika orang-orang yang tergabung didalamnya bertindak untuk mencapai tujuan bersama dalam melawan suatu otoritas atau kelompok lain yang terorganisir dan kuat seperti gembong narkoba. Aksi kolektif memiliki nuansa penentangan ketika aksi itu dilakukan oleh orang-orang yang kurang memiliki akses ke institusi-institusi untuk mengajukan klaim baru atau klaim yang tidak dapat diterima oleh pemegang otoritas atau pihak-pihak yang ditentang lainnya. Aksi kolektif yang melawan merupakan basis dari gerakan sosial, Karena aksi itu seringkali merupakan satu-satunya sumberdaya yang dimiliki oleh orang-orang

awam dalam menentang pihak lain yang lebih kuat seperti negara, korporasi eksploitatif dan gembong narkoba yang terorganisir.

Charles Tilly (2002) menyebutkan bahwa aksi kolektif merupakan gagasan kolektif untuk melawan pelaku aksi yang dianggap meruntuhkan sistem dan sampah masyarakat. Gerakan sosial bisa beroperasi dalam batas-batas legalitas suatu masyarakat, namun bisa juga bergerak secara illegal atau sebagai kelompok bawah tanah (*underground groups*). Mode perlawanan ini tergantung pada pembacaan strategis yang dilakukan oleh para aktor terhadap isu dan lawan yang dihadapi (Fadillah Putra, 2006: 2).

Pada kasus aksi kolektif pemuda sadar pemilu luber dan jurdil, gerakan dilakukan dimulai dari aksi tersembunyi per individu hingga kemudian tatkala dinilai tidak efektif menjadi gerakan yang terbuka, massif, legal dan sistematis. Gerakan ini merupakan aksi katarsisme massa terhadap runtuhnya norma dan sistem sosial akibat kepentingan politik dari simpatisan partai. Keresahan yang meluas terhadap adanya simpatisan yang dinilai sebagai sampah masyarakat menjadi alasan lahirnya kesadaran bahwa simpatisan yang sering mengintimidasi masyarakat adalah musuh bersama. Terkait dengan fenomena diatas, studi ini menempatkan perspektif Gerakan Kolektif Antony Giddens sebagai perspektif utama dalam membedah kajian gerakan sosial aksi melawan narkoba

Giddens tidak percaya sebuah realitas sosial dapat dipahami secara utuh jika analisis sosial tidak mempertautkan antara perilaku aktor dengan struktur yang dia pahami. Lahirnya tindakan aktor merupakan persenyawaan antara motivasi pribadi dan tuntutan struktur yang telah ditafsirkannya. Keduanya saling mengandaikan sehingga keduanya memiliki hubungan yang bersifat dualitas bukan dualisme. Keduanya setara, saling mempengaruhi dan memiliki nilai signifikansi yang sama dalam terwujudnya

sebuah tindakan. Giddens menyebut aktor sebagai pelaku yang melakukan tindakan dan peristiwa-peristiwa di dunia. Sementara struktur bukanlah nama bagi totalitas dan bukan pula kode tersembunyi. Struktur adalah aturan dan sumberdaya yang terbentuk dari dan membentuk keterulangan praktik sosial. Dalam hal ini Giddens berseberangan dengan penganut strukturalisme seperti Durkheim yang menganggap hubungan agen dan struktur bersifat dualisme, eksternal dan berupa kekangan (*memaksa/constrained*) terhadap agen (Doyle Paul Johnson, 1994: 177-178). Giddens meyakini bahwa hubungan struktur dengan agen itu bersifat dualitas (*timbang-balik*), internal, mengekang (*constraining*) namun juga membuat agen mampu (*enabling*) melahirkan tindakannya sekaligus. Dualitas struktur itu terjadi dalam praktik sosial yang berulang (*reproduksi sosial*) dan terpola dalam lintas ruang dan waktu (Antony Giddens, 1984: 25-27).

Dalam kacamata Giddens, gerakan sosial dapat diagensikan (*gerakkan*) oleh aktor karena mereka mampu memobilisasi masyarakat melalui kekuasaan yang dimilikinya. Kekuasaan menduduki posisi sentral dalam rangkaian teoritik strukturasi Giddens. Dalam kacamata Giddens, kekuasaan dihasilkan dalam dan melalui reproduksi struktur-struktur dominasi. Figur yang memiliki kekuasaan adalah mereka yang menguasai sumberdaya dan mampu menyalurkannya pada pihak lain yang dinyatakan sebagai bawahannya. Hal ini berbeda dengan konsep kekuasaan yang dikonstruksikan oleh Weber. Weber (1964) berpandangan bahwa "Kekuasaan adalah kemampuan seorang aktor (*pelaku*) mewujudkan gagasan-gagasannya sekalipun ditentang oleh orang-orang lain dalam suatu hubungan sosial" ("*Power (macht) is the probability that one actor within a social relationship will be in a position to carry out his own will despite resistance*").

Bagi Giddens, kekuasaan tidak dapat dipertahankan jika ia hanya mendasarkan pada kemampuan memaksa. Sebab ketundukan seseorang terhadap ketakutan pada orang lain hanyalah ketundukan semu yang apabila ia memperoleh kesempatan dan momentum untuk melawan maka ia akan melepaskan diri dari cengkeraman kekuasaannya. Tetapi kekuasaan yang sesungguhnya adalah kekuasaan yang dapat menyalurkan sumberdaya yang dibutuhkan oleh orang lain pada seseorang. Karena itu menurut Giddens, seorang aktor mampu mendominasi pihak lain apabila ia menguasai struktur-struktur sosial yang mendasari hubungan-hubungan sosial didalam masyarakat.

Artikel ini berangkat dari hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai *strategy of inquiry*. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan” (Iskandar, 2009). Penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya. Metode kualitatif ini bersifat terbuka dan dinamis sehingga memungkinkan informan untuk mengungkapkan pengalamannya dengan terbuka. Dalam penelitian ini, metode kualitatif dianggap peneliti mampu mengkaji mengapa lahirnya gerakan aksi melawan narkoba.

Kesadaran Praktis Dan Agensi Gerakan Kolektif

Dalam perspektif Giddens (1984) kesadaran praktis adalah kemampuan seseorang memberi perhatian terhadap segala peristiwa yang terkait dengan tanggung jawab dan aktivitasnya. Dalam bahasa lain, kesadaran praktis merupakan kemampuan seorang agen (aktor) merefleksikan realitas pelbagai peristiwa. Agen mampu memberi argumentasi yang bersesuaian antara satu

aktivitas dengan yang lainnya berikut alasan-alasan logisnya. Sejalan dengan pandangan Giddens diatas, rasionalitas para teungku dayah dan aparaturnya meng-agensi gerakan kolektif sadar melawan narkoba tidak terlepas dengan keyakinan para teungku dayah.

Terdapat tiga teungku dayah kharismatik yang meng-agensi gerakan sosial aksi melawan narkoba mereka adalah Abu Hasballah Nisam, Abati Babah Buloh dan Abi Muslim At-Thahiry. Abu Hasballah Nisam adalah pimpinan dayah Darut Thalibin Nisam, Abati Babah Buloh merupakan pimpinan Dayah Nurul Islam Babah Buloh dan Abi Muslim At-Tahiry merupakan Pimpinan Dayah Darul Mujahidin Blang Weu Panjo. Ketiga dayah tersebut terletak di Aceh Utara. Namun, kharisma ketiga ulama besar Aceh Utara ini menembus batas geografis Aceh Utara. Mereka memiliki pengaruh kuat disepanjang pantai timur Aceh.

Tampilnya para teungku dayah kharismatik sebagai aktor dalam agensi pemberantasan narkoba di Ujoeng Pacu tidak terlepas dari kesadaran praktis tentang bahayanya narkoba bagi agama dan masyarakat. Dalam perspektif Giddens (1984) kesadaran praktis adalah kemampuan seseorang memberi perhatian terhadap segala peristiwa yang terkait dengan tanggung jawab dan aktivitasnya. Dalam bahasa lain, kesadaran praktis merupakan kemampuan seorang agen (aktor) merefleksikan realitas pelbagai peristiwa. Agen mampu memberi argumentasi yang bersesuaian antara satu aktivitas dengan yang lainnya berikut alasan-alasan logisnya. Sejalan dengan pandangan Giddens diatas, rasionalitas para Teungku dayah meng-agensi gerakan kolektif pemberantasan narkoba tidak terlepas dengan keyakinan para Teungku Dayah bahwa menjaga agama berarti menjaga masyarakat dan sebaliknya menjaga masyarakat berarti menjaga agama.

PEMBAHASAN

Memberantas Narkoba

Proses pengajian untuk mentransformasi pengetahuan tentang bahaya narkoba bagi individu, keluarga, lingkungan dan eksistensi agama Islam dilakukan oleh para Teungku Dayah di mesjid Ujoeng Pacu. Namun istighotsah dan zikir bersama secara sengaja dilakukan ditempat terbuka. Hal ini tidak lain dimaksudkan sebagai ajakan umum dan kampanye pada khalayak ramai bahwa gerakan ini maslahat (penting) bagai kepentingan umum. Istighotsah dan zikir dilakukan oleh para Teungku Dayah di Buket Napai Ujoeng Pacu. Lokasi ini dipilih karena letaknya yang strategis yaitu tinggi, luas dan merupakan pintu masuk gampoeng Ujoeng Pacu. Keberadaan lokasi strategis ini memungkinkan semua anggota masyarakat bisa ikut dan memiliki daya getar luar biasa bagi para mafia narkoba karena merekapun secara terang-benderang bisa menyaksikan suatu aksi yang heroik untuk melawan mereka.

Hubungan solid antara masyarakat dan ulama berhasil menggelorakan gerakan kolektif pemberantasan narkoba di Ujoeng Pacu. Keberhasilan ini memberikan sumbangsih strategis bagi dunia, sebab narkoba dalam realitas aktual merupakan isu global tetapi selalu saja para penggiat pemberantasannya gagal melawan mafia narkoba yang terorganisir dan selalu ada orang kuat dibelakang mereka. Sebab itu pula, masyarakat Ujoeng Pacu menyadari perjuangan dan gerakan kolektif melawan narkoba tidak pernah mengenal kata usai. Perlawanan balik dari mafia narkoba selalu mengintai karena itu tidak boleh lengah dan selalu harus mampu menjaga hubungan dan konsistensi gerakan kolektif.

Strategi Mempertahankan Konsistensi Gerakan

Pelbagai teror dan serangan gencar dilakukan oleh para mafia narkoba dan kaki

tangannya secara fundamental bertujuan untuk menciptakan demoralisasi pada gerakan anti narkoba yang digelorakan secara kolektif oleh warga Ujoeng Pacu. Namun, tindakan itu tidak berhasil menggoyahkan semangat dan daya juang masyarakat sama sekali. Bahkan yang terjadi, pelbagai teror itu justru memperkokoh semangat masyarakat untuk lebih agresif dalam melawan raja narkoba di Ujoeng Pacu. Teror-teror itu mempertebal keyakinan masyarakat bahwa narkoba dan para cukongnya merupakan penyakit sosial yang harus diamputasi.

Penguatan dan penjagaan konsistensi gerakan juga dilakukan melalui pengelahiran qanun (hukum) desa. Qanun Desa Ujoeng Pacu Nomor 10 Tahun 2015, menegaskan semua persoalan tentang pola-pola relasi sosial yang berlaku di masyarakat Ujoeng Pacu. Keberadaan qanun ini yang terpenting adalah penegasan bagaimana menjaga keamanan yang baik sehingga Ujoeng Pacu menjadi gampoeng yang aman dan nyaman termasuk terbebas dari peredaran narkoba. Transformasi gerakan sebagai gerakan keagamaan (jihad mengusir maksiat/*leut maksiet*), penguatan intensitas komunikasi antar warga, transformasi ronda malam sebagai ruang penguatan sentuhan emosional, sosial dan psikologis dan qanun gampoeng merupakan modal sosial berharga yang mengikat dan menjaga konsistensi gerakan kolektif masyarakat Ujoeng Pacu dalam memberantas narkoba.

KESIMPULAN

Gerakan sosial dalam aksi pemberantasan narkoba yang dilakukan para Teungku Dayah dan elite aparat Gampong di Ujoeng Pacu kota Lhokseumawe merupakan aksi kolektif yang dipicu oleh kegelisahan mendalam terhadap kenyamanan hidup mereka dalam realitas kekinian maupun masa depan. Dekadensi moral pecandu dan hilangnya harta

benda masyarakat akibat di curi oleh pelaku menjadi dasar lahirnya keresahan kolektif masyarakat Ujoeng Pacu dan Teungku Dayah terhadap mafia narkoba. Inisiasi agensi gerakan yang dilakukan para Teungku Dayah melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan menyemai tumbuhnya moral gerakan sebagai gerakan *jihad fisabilillah* (perang agama) memberantas induk maksiat (*peu leut ma maksiet*). Kelindansi hubungan triadik antara keresahan sosial, penyelamatan masa depan generasi dan ibadah kepada Allah SWT menjadi dasar motivasi lahirnya gerakan kolektif masyarakat Ujoeng Pacu dalam memberantas narkoba.

Selain melibatkan teungku dayah kharismatik untuk memperkuat konsolidasi moral gerakan, penyerahan para mafia narkoba dan pengikutnya kepada kepolisian senantiasa dikoordinasikan pula dengan TNI Denrudal Pulo Rungkom. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi teungku dayah dan masyarakat untuk memberi tekanan berlipat terhadap pihak berwajib agar memperlakukan mafia narkoba sesuai dengan prosedur hukum.

Namun, objektivitas sosial berkata lain. Teror yang dilakukan para mafia narkoba melalui pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh para teungku dayah justru mempertebal moralitas gerakan kolektif warga Ujoeng Pacu. Pertautan hubungan sosial yang didasari oleh hubungan darah sesama warga, intensivitas komunikasi antar warga pasca serangan balik mafia narkoba, ronda malam yang dimaknai tidak hanya sebagai menjaga keamanan tetapi juga sebagai penambahan wahana dialektika (*free public sphere*) antar warga dan pengelahiran qanun gampong telah menjadi modal sosial berharga dalam menjaga konsistensi gerakan.

Secara konseptual, studi ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, terutama mengenai kaitan antara aksi massa dengan kebijakan negara serta mengenai masing-masing dimensi dari gerakan sosial dalam aksi melawan narkoba

Gerakan sosial dalam aksi melawan peredaran narkoba yang dilakukan oleh para Teungku Dayah merupakan pembelajaran berharga (*Lesson Learned*) bagi Aceh, Indonesia dan dunia khususnya dalam pemberantasan narkoba yang telah lama menjadi horor dan teror bagi Indonesia dan dunia. Maka ditengah-tengah kegagalan Indonesia mengatasi penyebaran narkoba apa yang dilakukan oleh Teungku Dayah dan warga Ujoeng Pacu menjadi inspirasi yang sebaiknya diadopsi dan disebar ke wilayah Indonesia lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams. Ian. 2004. *Idelogi Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depannya*. Yogyakarta: Qalam
- Barthes. Roland. 1983. *Mythologies*. New York: Hill and Wang
- Bruneissen. Van. 1992. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan
- Besley. Catherine. 1990. *Critical Practice*. London: Routledge
- Bowen. R. John. 1993. *Muslims Through Discourse: Religion And Ritual In Gayo* Society. New Jersey: Priceton University Press
- Benda. J. Harry. 1985. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Demografi Gampoeng Ujoeng Pacu 2015
- Elias, Norbert. 1993. *Violence and Civilization: The State Monopoly of Physical Violence and Its Infringement*. London: Verso
- Faisal. Sanapiah. 2003. *Filosofi dan Akar Tradisi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- 2003. *Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali
- Giddens, Antony. 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of*

- 1985. *Structuration*. UK: Polity Press
Modernity, Totalitarianism and Critical Theory. Berkeley: University Of California Press
- Geertz. Clifford. 1981. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya 1981
- Gurr, Ted. Robert. 1970. *Relative Deprivation and The Impetus To Violence*. Princeton: Princeton University Press
- Haryatmoko. 2006. "Politik Melirik Agama Karena Seks: Panoptisme, Kekuasaan dan Erotisme". Basis, No. 09-10, Tahun ke-55, September-Oktober
- Harian Serambi Indonesia, 6 Maret 2015
<http://aceh.tribunnews.com/2014/01/02/pengguna-narkoba-di-aceh-capai-10-ribu>, 2 Desember 2013.
- ISMUHA. 1983. *Adat dan Agama di Aceh*. Banda Aceh: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Syiah Kuala
- Paul Johnson. Paul. Doyle. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I*. Jakarta: Gramedia
- Miles. B. Matthew dan A. Michael Haberman. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta 1992.
- Moleong. J. Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nugroho. Heru. 2001. *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nirzalin. 2011. *Krisis Agensi Politik Teungku Dayah Di Aceh*. Yogyakarta: Disertasi Program Doktor Sosiologi Universitas Gadjah Mada
- 2012. *Ulama Dan Politik Di Aceh: Menelaah Hubungan Kekuasaan Teungku Dayah Dan Negara*. Yogyakarta: Maghza Pustaka
- Nur. Mannan. 1975. *Studi Tentang Dayah di Samalanga*. Banda Aceh: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
- Patton Michael Quinn. *How to Use Qualitative Methods Evaluation*. Sage
- Tilly, Charles. 1981. *Class Conflict And Collective Action*. London: Sage Publication
- Weber. Max. 1964. *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: The Free Press, 1964
- Zainuddin. H. M. 1980. *Pengaruh Kebudayaan Islam dalam Perang Aceh Dengan Belanda*. Jakarta: Bharatara Karya Aksara